

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. Suatu SKPD dapat dikatakan berhasil jika indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran SKPD. Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

**Atau:**

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berikut disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Dari 4 (empat) Indikator Kinerja utama yang ditetapkan, yang mencapai target kinerja sebanyak 2 (dua) indikator, sedangkan 2 (indikator) tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pengukuran Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 tergambar pada tabel berikut :

Tabel.3.1 Pengukuran Kinerja DPMPTSP Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS		IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kapuas Hulu	1.	Kenaikan / penurunan nilai realisasi investasi	11,54%	206,69%	1.791%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1.	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Spipise	Spipise	100%
		2.	Proses Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP (waktu penyelesaian izin)	75%	91,52%	122%
		3.	Jumlah Pelimpahan kewenangan pada PTSP	16 Ijin	13 ijin	81,25%

**1. Sasaran meningkatnya investasi di Kabupaten Kapuas Hulu, dengan indikator kinerja :**

**1.1. Kenaikan / penurunan nilai realisasi investasi.**

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

Kinerja investasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan berdasarkan target yang ditentukan oleh BKPM RI yang disampaikan melalui DPM PTSP Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 268,90 Milyar, yang mana pada akhir tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 555,78 Milyar terdiri dari PMDN sebesar Rp. 541,41 Milyar dan PMA sebesar Rp. 14,37 Milyar sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Target dan realisasi capain investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017  
( Dalam Jutaan Rupiah )

NO	KABUPATEN/KOTA	TARGET		REALISASI
		PMDN	PMA	
1.	Kota Pontianak	185.397	57.136	<b>242.533</b>
2.	Kota Singkawang	4.425	15.272	<b>19,697</b>
3.	Kabupaten Landak	953.728	2.695.203	<b>3.648.931</b>
4.	Kabupaten Bengkayang	734,215	0	<b>734.215</b>
5.	Kabupaten Mempawah	91.460	2.291.634	<b>2.383.094</b>
6.	Kabupaten Sambas	445.604	225.257	<b>670.861</b>
7.	Kabupaten Sanggau	1.319.082	2.996.016	<b>4.315.098</b>
8.	Kabupaten Sintang	787.231	1.158.717	<b>1.945.948</b>
9.	Kabupaten Kapuas Hulu	14.369	541.409	<b>555.778</b>
10.	Kabupaten Ketapang	2.769.354	794.114	<b>3.563.468</b>
11.	Kabupaten Sekadau	395	340.497	<b>340.892</b>

12.	Kabupaten Melawi	242.164	59.114	<b>301.278</b>
13.	Kabupaten Kayong Utara	267	0	<b>267</b>
14.	Kabupaten Kubu Raya	33.647	1.206.536	<b>1.240.183</b>

(sumber: BKPM RI, data diolah)

Pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu telah ditetapkan bahwa indikator kinerja utama dari sasaran strategis meningkatnya investasi di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2017 adalah meningkatnya nilai investasi sebesar 11,54% dari target yang ditetapkan oleh BKPM RI. Dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 268,90 Milyar, dimana pada akhir tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 555,78 Milyar maka capaian kinerjanya sebesar 206,69%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja DPM PTSP Kapuas Hulu telah melebihi target yang ditetapkan dalam IKU RPJMD.

Tabel 3.3 Pencapaian kinerja indikator kinerja kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya investasi di Kabupaten Kapuas Hulu	Kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi	11,54%	206,69%	1.791%

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2015 dan tahun 2016.

Pada paparan di atas telah disampaikan bahwa capaian kinerja dari Indikator kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi pada tahun 2017 telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 206.69%. Peningkatan kinerja tersebut apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya secara umum selalu dapat melebihi dari target nilai investasi yang telah ditetapkan oleh BKPM RI, dimana pada tahun 2016 sebesar 437,61 % dan tahun 2016 sebesar 375%.

Selanjutnya dari keseluruhan realisasi investasi tersebut peranan Penanam Modal Dalam Negeri lebih besar dibandingkan oleh penanam modal asing, dimana pada tahun 2016 mencapai 337% dan tahun 2017 mencapai 201% dari total investasi di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Investasi Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun 2015, 2016 dan 2017

( Dalam Milyar Rupiah )

NO	TAHUN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN
		PMDN	PMA	TOTAL	PMDN	PMA	TOTAL	
1.	2015	293,00	0	293,00	1.269,70	12,51	1.282,21	437%
2.	2016	802,46	0	802,46	2.710,20	302,07	3.012,27	375%
3.	2017	268,90	0	268,90	541,41	14,37	555,78	206,69%

(sumber: BKPM RI, Data diolah)

c. Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Beberapa penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi adalah sebagai berikut :

Penyebab keberhasilan :

1. Meningkatnya/berhasilnya promosi dan penyebaran informasi peluang investasi.
2. Tersediannya luas lahan untuk investasi khususnya sektor primer.
3. Kondisi sosial politik dan keamanan yang kondusif.

Kemudian beberapa penyebab kendala dalam peningkatan investasi di daerah:

1. Belum tersedianya peta investasi/peluang usaha sebagai bahan promosi investasi
2. Pelaksanaan promosi masih belum efektif karena hanya dilaksanakan melalui keikutsertaan pameran-pameran;

Adapun solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan investasi di daerah antara lain :

1. Menyusun berbagai dokumen perencanaan di bidang investasi antara lain :
2. Meningkatkan promosi investasi;
3. Mengoptimalkan fungsi pengendalian investasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

## 2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan, dengan indikator kinerja :

### 2.1. Sistem informasi pelayanan perizinan

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

Tabel 3.6 Pencapaian kinerja indikator kinerja sistem informasi pelayanan perizinan

NO	SASARAN STRATEGIS		IKU	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1.	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Spipise	100%

Indikator kinerja sistem informasi pelayanan perizinan dengan target Spipise di tahun 2017 terealisasi 100%. Dengan demikian seluruh pelayanan perizinan dengan nilai investasi 500 Juta sampai dengan 10 Milyar sejak tahun 2017 dilaksanakan secara elektronik atau online.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2015 dan tahun 2016.

Tabel 3.7 Realisasi kinerja sistem informasi pelayanan perizinan tahun 2015, 2016, dan 2017

No	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sistem informasi pelayanan perizinan	Spipise	Spipise	100%	Spipise	Spipise	100%	Spipise	Spipise	100%

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021.

Tabel 3.8 Perbandingan realisasi kinerja sistem informasi pelayanan perizinan dengan target akhir RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Sistem informasi pelayanan perizinan	Spipise dan Simyandu	Spipise	50%

Dari tabel diatas menggambarkan capaian kinerja Indikator kinerja sistem informasi pelayanan perizinan dibandingkan dengan target Renstra DPM PTSP tahun 2016-2021 baru mencapai 50%. Untuk SIMYANDU direncanakan pelaksanaan pengadaan sistem tahun 2019, sehingga diakhir periode Renstra DPMPTSP tahun 2016 - 2021 target kinerja ini sudah tercapai 100% dan siap dipergunakan.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan / kegagalan pencapaian target indikator kinerja sistem informasi pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

Penyebab keberhasilan :

1. Ketersediaan anggaran pendukung program dan kegiatan.
2. Tersedianya sarana penunjang spipise.

Penyebab kegagalan :

1. Keterbatasan sumberdaya aparatur yang menangani spipise.
2. Jaringan komunikasi data yang kurang mendukung.

Alternative solusi :

1. Memaksimalkan tenaga yang ada dengan bimtek dan kursus
2. Segera menyampaikan laporan apabila jarkomdat bermasalah.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Selama tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan upaya efisiensi untuk pencapaian indikator kinerja sistem informasi pelayanan perizinan antara lain efisiensi pada kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sipise.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator kinerja sistem informasi pelayanan perizinan didukung dengan program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi serta Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran.

## 2.2. Proses Perizinan yang Diterbitkan Sesuai SOP

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

Tabel 3.9 Pencapaian kinerja indikator proses perizinan yang diterbitkan sesuai SOP

NO	SASARAN STRATEGIS		IKU	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	2.	Proses Perijinan yang diterbitkan sesuai SOP	75%	91,52%

Indikator kinerja proses perizinan yang diterbitkan sesuai SOP ( waktu penyelesaian izin 3 hari ) ditargetkan sebesar 75% ditahun 2017, terealisasi sebesar 91,52% atau 122% dari target yang ditetapkan. Total jumlah perizinan yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 sebanyak 2.287 dokumen izin dan masih terdapat 194 dokumen permohonan izin yang telah diproses tapi masih tidak sesuai SOP perizinan dan non perizinan.



- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2015 dan tahun 2016

Tabel 3.10 Realisasi kinerja proses perizinan yang diterbitkan sesuai SOP tahun 2015, 2016, dan 2017

No	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Proses Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	N/A	N/A	N/A	70%	100%	143%	75%	91,52%	122%

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021

Tabel 3.11 Perbandingan realisasi kinerja proses perizinan yang diterbitkan sesuai SOP dengan target akhir RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Proses Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	90%	91,52%	101,68%

Dari tabel diatas menggambarkan capaian kinerja Indikator kinerja proses perizinan yang diterbitkan sesuai SOP dengan target Renstra DPMPTSP tahun 2016-2021 sudah mencapai 101,68% atau telah melebihi target yang ditetapkan.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan / kegagalan pencapaian target indikator kinerja proses perizinan yang diterbitkan sesuai SOP adalah sebagai berikut :

Penyebab keberhasilan :

1. Tersedianya anggaran.
2. Tersedianya sarana penunjang kinerja.

Penyebab kegagalan :

1. Keterbatasan sumberdaya aparatur.
2. Kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang perizinan dan non perizinan.

Alternative solusi :

1. Memaksimalkan tenaga yang ada dengan bimtek dan kursus.
2. Memanfaatkan layanan perizinan keliling untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya

Selama tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan upaya efisiensi untuk pencapaian indikator kinerja proses perizinan yang diterbitkan sesuai SOP antara lain efisiensi pada penggunaan ATK dan belanja cetak.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator kinerja proses perizinan yang diterbitkan sesuai SOP didukung dengan program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan.

### 2.3. Jumlah pelimpahan kewenangan pada PTSP

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

Tabel 3.12 Pencapaian kinerja indikator jumlah pelimpahan kewenangan pada PTSP

NO	SASARAN STRATEGIS		IKU	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	3.	Jumlah pelimpahan kewenangan pada PTSP	16 Izin	13 Izin

Indikator kinerja jumlah pelimpahan kewenangan pada PTSP ditargetkan sebanyak 16 izin ditahun 2017, terealisasi sebanyak 13 izin dan 4 non izin.

Dari target yang ditetapkan penambahan 1 (satu) Izin ditahun 2017 tidak dapat direalisasikan karena tahun 2017 difokuskan pada pembenahan perizinan dan non perizinan yang ada. Untuk target yang tidak tercapai ditahun 2017 akan dilaksanakan ditahun 2018 dengan target penambahan jumlah pelimpahan kewenangan pada PTSP minimal 4 (empat) izin yang akan menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk mengejar target 17 izin di tahun 2018.

Perizinan dan Non Perizinan yang telah menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan yaitu :

- ***Perizinan***

1. Sektor Penanaman Modal
  - a. Izin Prinsip
  - b. Izin Usaha
2. Perdagangan
  - a. Izin Usaha Perdagangan (IUP)
  - b. Izin Tempat Usaha (IUT)
  - c. Izin Perluasan
3. Industri
  - a. Persetujuan Prinsip (USAHA INDUSTRI KECIL)
  - b. Izin Usaha Industri
4. Pekerjaan Umum
  - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

5. Jasa Lainnya
  - a. Izin Reklame
6. Perhubungan
  - a. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
7. Kesehatan
  - a. Izin Apotik
  - b. Izin Toko Obat
8. Lingkungan
  - a. Izin Gangguan (HO)

- **Non Perizinan**

1. Layanan Informasi dan / atau Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
  4. Tanda Daftar Industri (TDI)
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2015 dan tahun 2016

Tabel 3.13 Realisasi kinerja proses jumlah pelimpahan kewenangan pada PTSP tahun 2015, 2016, dan 2017

No	Indikator Kinerja	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jumlah pelimpahan kewenangan pada PTSP	-	-	-	15 izin	15 izin	100%	16 izin	16 izin	81,25%

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021.

Tabel 3.14 Perbandingan realisasi kinerja jumlah pelimpahan kewenangan pada PTSP dengan target akhir RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pelimpahan kewenangan pada PTSP	20 izin	13 izin	65%

Dari tabel diatas menggambarkan capaian kinerja Indikator kinerja jumlah pelimpahan kewenangan pada PTSP dengan target Renstra DPMPTSP tahun 2016-2021 sebanyak 20 izin baru terealisasi 13 atau sebesar 65%.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan / kegagalan pencapaian target indikator kinerja jumlah pelimpahan kewenangan pada PTSP adalah sebagai berikut :

Penyebab keberhasilan :

1. Tersedianya anggaran.
2. Tersedianya sarana penunjang kinerja.

Penyebab kegagalan :

1. Kurangnya koordinasi dengan instansi yang akan melimpahkan izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Keterbatasan data.

Alternative solusi :

1. Mengintensifkan koordinasi dengan SKPD yang akan melimpahkan kewenangannya kepada DPMPTSP.
2. Melengkapi data yang diperlukan untuk memudahkan pelimpahan kewenangan kepada DPMPTSP.

- e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya

Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan berbagai upaya efisiensi untuk pencapaian indikator kinerja jumlah pelimpahan kewenangan pada PTSP antara lain efisiensi pada kegiatan pendukung indikator kinerja dan perjalanan dinas.

- f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator kinerja jumlah pelimpahan kewenangan pada PTSP didukung dengan program peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kegiatan penataan perizinan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, selama tahun 2017 telah melaksanakan 7 program dan 35 kegiatan dengan anggaran dan realisasi tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Realisasi anggaran DPMPTSP tahun anggaran 2017

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>800.896.500,00</b>	<b>787.786.920,00</b>	<b>98,36</b>
	<b>Kegiatan :</b>			
	Penyediaan jasa surat menyurat	900.000,00	900.000,00	100,00
	Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	23.460.000,00	22.125.920,00	94,31
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000,00	2.400.000,00	96,00
	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	67.980.000,00	67.980.000,00	100,00
	Penyediaan jasa Pengamanan Kebersihan Kantor	10.276.000,00	10.273.500,00	99,98
	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00

	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.381.500,00	35.381.500,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	9.387.000,00	9.359.000,00	99,70
	Penyediaan Komputer Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.500.000,00	20.845.000,00	92,64
	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan	17.300.000,00	17.220.000,00	99,54
	Penyediaan Makanan dan Minuman	49.600.000,00	48.688.100,00	98,16
	Rapat-RapatKordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	407.826.000,00	400.718.400,00	98,26
	Rapat-RapatKordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	83.550.000,00	81.659.500,00	97,74
	Penyusunan RKA, DPA dan DPPA	4.157.500,00	4.157.500,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	53.578.500,00	53.578.500,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>62.985.687,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>Kegiatan :</b>			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63.000.000,00	62.985.687,00	99,98
<b>3.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>277.663.000,00</b>	<b>276.692.989,00</b>	<b>99,65</b>
	<b>Kegiatan :</b>			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	277.663.000,00	276.692.989,00	99,65
<b>4.</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>8.812.500,00</b>	<b>8.812.500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Kegiatan :</b>			
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD	1.660.500,00	1.660.500,00	100,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.115.500,00	3.115.500,00	100,00
	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	1.123.000,00	1.123.000,00	100,00

	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di SKPD	1.705.500,00	1.705.500,00	100,00
	Penyusunan Laporan Tahunan	1.208.000,00	1.208.000,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi</b>	<b>440.838.000,00</b>	<b>438.396.180,00</b>	<b>99,45</b>
	<b>Kegiatan :</b>			
	Pameran Investasi Daerah	273.906.000,00	271.466.720,00	99,11
	Pemantauan, Pembina dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	166.932.000,00	166.929.460,00	100,00
<b>6.</b>	<b>Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi</b>	<b>367.192.000,00</b>	<b>361.557.909,00</b>	<b>98,47</b>
	<b>Kegiatan :</b>			
	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kab. KH	158.892.000,00	155.896.300,00	98,11
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan SPIPISE Kab. KH	109.820.000,00	109.736.100,00	99,92
	Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	37.035.000,00	36.017.200,00	97,25
	Peningkatan Kerjasama Kemitraan UMKM dengan PMA/PMDN Berskala Besar	30.610.000,00	30.073.309,00	98,25
	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	30.835.000,00	29.835.000,00	96,76
<b>7.</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan</b>	<b>426.553.500,00</b>	<b>423.812.844,00</b>	<b>99,36</b>
	<b>Kegiatan :</b>			
	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	146.575.500,00	146.569.500,00	100,00
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. KH	80.400.500,00	79.960.800,00	99,45
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling Kab. KH	140.650.000,00	140.370.000,00	99,80
	Penataan Perizinan	58.927.500,00	56.912.544,00	96,58
	<b>Jumlah</b>	<b>2.384.955.500,00</b>	<b>2.360.045.029,00</b>	<b>98,96</b>



Realisasi anggaran tersebut diatas diluar komponen gaji dan tunjangan perbaikan penghasilan. Apabila digabungkan secara keseluruhan maka realisasi anggaran Dinas PMPTSP Tahun 2017 adalah sebesar 97,01 %.

#### C. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017.

Tabel 3.15 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran  
DPMPTSP tahun 2017

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian
1	Meningkatnya investasi di Kabupaten Kapuas Hulu	Kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi	11,54%	206,69%	1.791%	Rp.539.318.000	Rp.534.321.689	99,07%
	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Spipise	Spipise	100%	Rp.109.820.000	Rp.109.736.100	99,92%
		Proses Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP (waktu penyelesaian izin)	75%	91,52%	122%	Rp.287.225.500	Rp.286.939.500	99,90%
		Jumlah Pelimpahan kewenangan pada PTSP	16 Ijin	13 ijin	81,25%	Rp. 298.220.000	Rp.292.769.644	98,17%